

Industri Halal Sebagai Solusi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi di Nusa Tenggara Barat

Purnama Ramadani Silalahi^{1*}, Imsar²⁾, Abdul Fattah³⁾

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara Medan

*Email korespondensi: purnamaramadani@uinsu.ac.id

Abstract

This research aims to analyze the halal industry as a solution to increase economic growth in West Nusa Tenggara. The research approach uses a qualitative approach with in-depth interview methods. The findings in this research are that economic growth in a province can be increased, one of which is through optimizing the halal industry. By optimizing sharia-based industry, it will become an attractive brand for investors, tourists and creative economy players to improve the economy in NTB. This labeling of the halal industry must of course be supported by binding and sustainable provincial government regulations. So the existence of a halal park industry roadmap designed by the provincial government really helps accelerate the halal industry so that economic growth in NTB can grow and be strong. The halal industry not only pays attention to halal tourism, halal food, halal cosmetics and medicines but also pays attention to the facilities and infrastructure of the sharia financial industry, where the growth of sharia industrial assets in NTB is currently still relatively slow. The role of the OJK as well as financial and non-bank institutions is very much needed so that this halal industry can develop well.

Keywords: Halal Industry, Economic Growth, Sharia Financial Industry, Halal Tourism.

Saran sitasi: Silalahi, P. R., & Fattah, A. (2024). Industri Halal Sebagai Solusi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(02), 1444-1454. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i2.12709>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i2.12709>

1. PENDAHULUAN

Pendahuluan Amanat UUD 1945 menjadi pionir utama adanya gaya hidup halal bagi masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Untuk memenuhi amanat UUD 1945 produksi maupun distribusi halal produk membutuhkan skala besar yakni skala industri halal. Dalam hal ini, Kementerian Perindustrian berupaya mendorong pengembangan industri halal dan memandang perlu penguatan seluruh rantai nilai halal, dari sektor hulu hingga hilir. Selain itu, Negara juga telah menyiapkan regulasi spesifik terkait halal ini sebagaimana yang terbentuknya regulasi halal dalam UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUPJPH). UU ini mempertegas betapa pentingnya persoalan halal-haram dalam rantai produksi dari pelaku usaha mulai dari produksi, distribusi, subdistributor, grosir, pengecer hingga ke konsumen (Charity, 2017)

Kementerian Agama melalui UU No 26 Tahun 2019 menegaskan bahwa produk impor yang beredar

dan diperdagangkan di Indonesia akan diwajibkan bersertifikat halal (Kemenperin, 2023). Kewajiban ini akan bertahap dan juga akan lebih difokuskan pada produk makanan dan minuman terlebih dahulu dari tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan 19 Oktober 2024. Menteri Koordinator Bidang perekonomian, Airlangga Hartanto dalam acara “Indonesia Halal Industry Award” (IHYA) 2022 di Jakarta mengungkapkan Indonesia sebagai Negara mayoritas muslim terbesar mempunyai konsumsi yang besar dalam membelanjakan produk halal dan mendapatkan layanan halal yakni sebesar USD 184 di tahun 2020 dan diperkirakan pada tahun 2025 mencapai USD281,6 (Madjid, 2022). Namun demikian, antusias pemerintah belum sejalan dengan penerapan kebijakan yang sedang berjalan. Kebijakan ini dinilai cukup lambat dan terkesan belum siap menyediakan fasilitas sertifikasi halal bagi produsen (Adamsah, 2022). Penelitian Fathoni memaparkan bahwa tantangan industry halal di Indonesia disebabkan oleh

tantangan internal dan eksternal (Fathoni, 2020). Tantangan Internal industri halal diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat muslim akan informasi, wawasan dan penggunaan barang dan jasa halal. Penelitian Kartika (2020), Nusran (2018) dalam Silalahi menemukan faktor kesadaran konsumsi halal dipengaruhi oleh religiusitas dan keyakinan agama penggunanya. Dalam hal ini semakin tinggi tingkat keyakinan agama seseorang maka semakin tinggi pulak kesadarannya menggunakan produk halal (Silalahi, 2021). Sementara itu, masyarakat umumnya menganggap bahwa produk yang beredar dipasaran adalah produk halal padahal hal tersebut belum tentu halal (Pryanka, 2018). Tantangan internal lainnya yakni regulasi terkait sertifikasi halal yang terkesan lambat dan tidak massif. Program ini belum sepenuhnya didukung oleh regulasi dan aturan pendukung bagi Sehati yang diterbitkan pemangku kebijakan lainnya, misalnya dari kepala daerah, DPRD, asosiasi UMK, dan lingkungan kementerian terkait. Semua kebijakan masih berada dalam level pusat bahkan aggaran di BPJPH masih kecil, hanya sekitar 114 milyar rupiah, padahal program Sehati diharapkan akan mampu mendongkrak perolehan 10 juta sertifikat halal gratis (Khasanah, 2022).

Sementara itu, tantangan eksternal ialah penyebaran informasi dan sosialisasi masih banyak yang tumpang tindih antara jalur reguler dan *self declare*. Selama ini pelaku UMK masih banyak yang berasumsi sertifikat halal itu mahal, tidak ada transparan dari fasilitator dan penyedia layanan, pendaftarannya sulit, hingga tidak adanya kejelasan batas waktu (Muhammad, 2023). Kemudian, layanan online sertifikasi halal belum mampu dijangkau oleh UMKM yang belum melek teknologi. Alur pengajuan sehati ini juga dianggap sulit dan merepotkan karena pelaku usaha diwajibkan memiliki Nomor induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh lembaga Online Single Submission (OSS) dengan mengakses laman oss.go.id (BKPM, 2022).

Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai provinsi yang memiliki potensi pariwisata dengan kearifan lokal dan sumber daya alam yang melimpah, NTB menjadi salah satu destinasi pariwisata halal Indonesia. Pariwisata halal atau akrab dikenal *muslim-friendly tourism* ini menjadi salah satu sektor yang berpotensi kuat dalam pengembangan ekonomi Syariah NTB. Potensinya besar untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Perkembangan ekonomi Syariah di NTB cukup pesat, khususnya untuk sektor

pariwisata atau *muslim-friendly tourism* dan dunia makanan halal. Hal ini terkait dengan komitmen Pemda untuk menjadikan NTB sebagai Pusat wisata halal dan pengembangan ekonomi Syariah.

Dalam kajian pertumbuhan ekonomi, maka teori pertumbuhan ekonomi dibagi atas dua kelompok; pertama teori pertumbuhan klasik yang didasarkan atas keyakinan dan efektivitas mekanisme pasar. Kedua, pertumbuhan ekonomi modern. Teori ini merupakan teori yang dicetuskan oleh ahli ekonomi klasik yakni Adam Smith, Daid Ricardo dan Harrod Domar. Teori Harrod Domar menekankan arti pentingnya pembentukan investasi bagi pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi investasi suatu Negara maka semakin baik pula perekonomian dinegara tersebut. Investasi ini memengaruhi permintaan agregat dan pengeluaran agregat melalui kapasitas produksi (Boukhatem, 2018; Aprianti, 2022). Dalam laporan *Annual Islamic Finance Conference (AIFC)*, mengungkapkan dalam dekade terakhir, keuangan syariah telah menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat di industri keuangan global, bahkan melampaui pasar keuangan konvensional. Kesiapan industry jasa keuangan syariah menjadi salah satu strategi dalam mendukung sustainable finance serta menjadi penguatan Ekonomi dan Keuangan syariah (OJK 2022). Terlebih nilai asset keuangan syariah diproyeksi mencapai USD3,69 Triliun pada tahun 2024.

Berdasarkan penelitian Utomo dkk (2021) bahwa literasi keuangan syariah, sikap dan kesadaran sangat mempengaruhi niat pemilik bisnis untuk menggunakan produk keuangan syariah. Santoso (2019) mengungkapkan bahwa peran lembaga keuangan syariah implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi mampu mengurangi tingkat kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Temuan penelitian Susilawati, 2020 mengungkapkan bahwa ada tiga sektor bisnis halal yang diyakini lebih rentan pandemi Covid-19 guna memfasilitasi pemulihan ekonomi nasional yakni Keuangan halal, halal industri makanan dan fashion halal. Hal ini diperkuat oleh Jailani (2022) melalui penelitiannya menemukan bahwa gaya hidup di sektor perbankan syariah, pariwisata halal, dan makanan halal secara positif mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Berdasarkan pemaparan diatas, beberapa penelitian telah berusaha menggali peran dan hubungan antar industri halal dan keuangan syariah.

Namun demikian, penelitian ini hadir untuk memberikan analisis yang tajam terkait kontribusi Industri Halal Sebagai Solusi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi di Nusa Tenggara Barat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif yakni dengan melakukan wawancara mendalam. Peneliti melakukan kunjungan langsung dan wawancara ke wilayah yang konsen pada industry halal dan keuangan syariah yakni Dinas Pariwisata, Pengelola Resort Kawasan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kantor Bursa Efek Indonesia NTB, serta tempat fashion muslim NTB. Alasan pemilihan lokasi penelitian karena NTB lebih spesifiknya Lombok pernah menempati posisi teratas sebagai wisata halal terbaik di dunia menurut GMTI 2019. Lombok juga mendapat penghargaan World Halal Tourism Award 2015 untuk kategori World's Best Halal Beach Resort, World's Best Halal Honeymoon Destination, dan World's Best Halal Tourism Destination. Waktu penelitian dilakukan pada Agustus 2023. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yakni data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari hasil wawancara Wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada 23-24 Agustus 2023, hasil penelitian diperoleh dengan cara wawancara yang mendalam dengan narasumber sebagai bentuk pencarian data dan terlibat langsung dilapangan yang kemudian peneliti Analisa, berikut merupakan tabel jadwal wawancara yang dilakukan oleh peneliti:

Tabel 1 Jadwal wawancara Informan Kunci

Nama Informan	Tempat wawancara
I Nengah Gusla	Dinas pariwisata NTB
Gusti Bagus Ngurah Putra Sandiana	Kantor BEI NTB

Tabel diatas menunjukkan informan kunci yang terdiri dari pimpinan Dinas Pariwisata NTB dan Pimpinan Kantor BEI NTB yang dilaksanakan pada 23 Agustus 2023.

Tabel 2 Jadwal wawancara Informan Pendukung

Nama Informan	Tempat wawancara
Dhani	Alora Villa
Sandi	Desa Sade

Agar penelitian ini lebih objektif dan data-data akurat, penelitian mencari informan tambahan dengan cara melakukan pengamatan saat informan pendukung menjelaskan tentang kondisi perekonomian masyarakat setelah adanya support pemerintah terhadap industry halal dan asset keuangan syariah di

NTB. Serta melakukan wawancara yang mendalam, dimana wawancara tersebut dimaksudkan untuk memperoleh informasi secara akurat dari sumber data terpercaya. Bagian data sekunder penelitian ini merujuk pada data yang diambil dari website bps.go.id, website dinas pariwisata, web pemerintah kota NTB dan web resmi lainnya yang relevan dengan topic yang dikaji. Pada tahapan Analisa yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat daftar pertanyaan yang digunakan untuk wawancara kepada para informan sebagai pengumpulan data, yang kemudian dianalisis untuk mengetahui bagaimana informasi yang diberikan oleh informan, penelitian melakukan beberapa tahapan yaitu wawancara berdasarkan fokus penelitian mengenai Kondisi umum pariwisata NTB, kesiapan NTB menjadi destinasi halal, perkembangan asset keuangan syariah di NTB.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil

Terkait dengan kondisi umum pariwisata NTB peneliti mewawancarai pimpinan Dinas Pariwisata NTB. Menurut pemaparan dari Bapak I Nengah Gusla bahwa

“Indonesia merupakan negara yang sangat luas akan keindahan alam panorama alamnya menjadi salah satu provinsi yang menjadi tujuan dari wisatawan domestik maupun mancanegara karena NTB memiliki keindahan pantai yang masih Asri serta amat indah. kondisi umum pariwisata NTB terdiri dari 11 kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD), 5 di Pulau Lombok dan 7 di Pulau Sumbawa. Kondisi ini merupakan potensi pariwisata NTB yang tersebar di Pulau Lombok dan Sumbawa”.

Berikut destinasi Wisata Prioritas di NTB berdasarkan pemaparan Dinas Pariwisata NTB:



Gambar 1. Destinasi Wisata prioritas di NTB

Kondisi umum Pantai-pantai yang ada di kota Lombok dan Sumbawa yang memiliki panorama yang indah, pariwisata di kota Lombok ini ditetapkan sebagai salah satu DPSP di Indonesia yaitu Mandalika. Pariwisata NTB ini telah berhasil melaksanakan berbagai event International dan nasional dengan Sport Tourism sebagai daya tarik utama dengan keberadaan Sirkuit Mandalika di tahun 2022.

Hal ini diperkuat dengan pemaparan yang disampaikan oleh Dhani sebagai pengelola Resort Alora Villa yakni;

“Menjelang perlombaan sirkuit motoGp di Mandalika banyak pembangunan vila maupun hotel yang dibangun di kota Mataram dan Lombok bahkan warga-warga juga menyewakan rumahnya untuk penginapan sementara. Saat ajang perlombaan berlangsung selama sebulan penuh kota Mataram dan Lombok dipenuhi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Semua kamar hotel penuh selama sebulan itu, pantai-pantai ramai sekali dan lalu lintas jalan juga tidak pernah sepi.”

Mandalika bukan satu-satunya destinasi yang menarik wisatawan untuk datang ke NTB, Desa sade juga memiliki keunikan yang menjadikan lokasi ini wajib dikunjungi bagi wisatawan yang ada di NTB. Sebagaimana wawancara bersama Sandi selaku penduduk sasak Desa Sade memaparkan bahwa;

“Desa sade ini memiliki keunikan tersendiri seperti: 1. lantai rumah yg dipel dari kotoran hewan. Tidak seperti lantai di rumah-rumah pada umumnya. Di Desa Sade, lantai rumah justru dilumuri kotoran kerbau / sapi setiap beberapa waktu. Tujuannya adalah supaya lantai bersih dari debu-debu yang melekat, menguatkan lantai, dan memiliki fungsi untuk mencegah serangga terutama nyamuk masuk ke dalam rumah. 2. Tempat tinggal Suku Sasak Desa Sade merupakan tempat tinggal suku Sasak yang merupakan suku asli Lombok. Terdapat sekitar 700 jiwa di Desa Sade. Pernikahan di Desa Sade masih dilakukan dalam satu rumpun, sehingga keaslian warganya masih sangat terjaga. 3. Atap rumah dari ilalang kering Tipe-tipe rumah ini didasarkan pada fungsinya. Bale Bonter berfungsi sebagai tempat rumah para pejabat desa. Selain itu Bale Bonter memiliki fungsi untuk persidangan adat. Terdapat pula Bale

Kodong yang berfungsi sebagai tempat tinggal bagi orang-orang yang sudah jempo ataupun bagi orang-orang yang baru saja menikah namun belum memiliki tempat tinggal. Bale Tani, merupakan rumah yang digunakan untuk tempat tinggal masyarakat yang kebanyakan berprofesi sebagai petani. 4. Rumah yang tahan gempa Di Desa Sade terdapat 150 rumah. Rumah-rumah ini masih sangat sederhana. Berdinding anyaman bambu, beratap alang-alang kering, dan lantainya dibuat dari campuran tanah liat dengan sekam padi. 5. tradisi Unik Desa Sade memiliki beberapa tradisi unik, salah satu tradisi perkawinan. Saat akan menikah, perempuan harus diculik terlebih dahulu oleh pihak laki-laki. Nantinya, tempat bertemunya laki-laki dan perempuan sebelum si perempuan diculik adalah di depan pohon cinta. 6. Kain tenun Para perempuan di Desa Sade diharuskan bisa menenun. Para perempuan di desa ini rata-rata berpencaharian sebagai penenun. Sehingga di sepanjang jalan Desa Sade terdapat banyak penjual kain tenun.

Keunikan keunikan dari setiap lokasi yang ada di NTB memiliki nilai jual yang tinggi untuk menarik wisatawan dalam dan luar negeri untuk menikmati wisata di NTB. Pemerintah provinsi NTB mengemas keunikan ini dengan membangun brand industri halal sehingga menarik wisatawan muslim untuk tidak ragu dalam memilih NTB sebagai tempat tujuan yang harus dikunjungi. Bapak I Nengah Gusla menuturkan bahwa:

“Destinasi Halal yang kami maksudkan disini adalah: a. Tersedianya makanan dan kuliner khas Nusa Tenggara Barat yang halal. b.Tersedianya destinasi halal pariwisata Nusa Tenggara Barat, c. Tersedianya fasilitas travel yang sesuai dengan kaidah syar’i”

Selain itu, asset keuangan syariah juga mulai dikembangkan di NTB. Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Kantor Bursa Efek Indonesia (BEI) NTB yakni Bapak Gusti Bagus Ngurah Putra Sandiana bahwa;

“Aset keuangan Syariah di NTB masih dalam proses pengembangan. Namun demikian pengembangannya belum terlalu signifikan. Untuk dibidang pasar modal sendiri. Kami dari kantor perwakilan BEI di NTB masih memperkenalkan produk-produk pasar modal

yang konvensional dan untuk literasi ke pasar modal syariahnya belum terlalu mendalam dan belum banyak dilakukan. Hal ini disebabkan literasi inklusi pasar modalnya masih didominasi pada konvensional. Kantor perwakilan BEI sendiri pun di NTB ini baru dibuka pada tahun 2017. Sehingga kami masih berproses terus mengembangkan pasar modal syariah di NTB ini”.

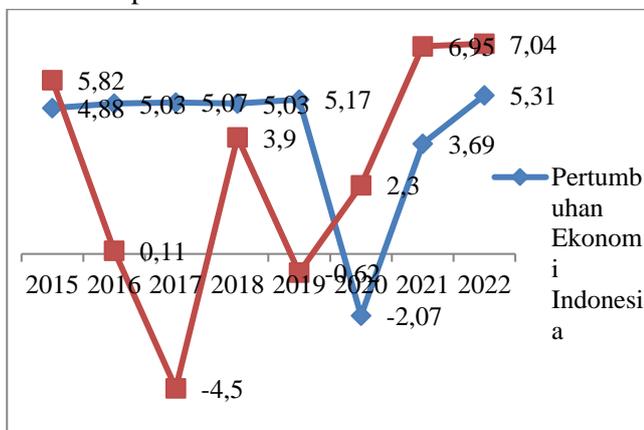
Begitu pula pada sistem perbankan syariahnya, Kantor perwakilan BEI di NTB menyatakan bahwa:

“Untuk diperbankan syariahnya, Bank NTB telah dikonversi menjadi Bank NTB Syariah terhitung sejak Oktober 2016 hingga diresmikan tanggal 13 September 2018. Sementara itu, izin dari OJK telah dikeluarkan sejak tanggal 4 September 2018 sesuai dengan surat keputusan dari OJK, tetapi pelaksanaannya baru bisa dijalankan tanggal 24 September 2018.”

3.2. Pembahasan

3.2.1. Kontribusi industri halal sebagai solusi peningkatan pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Barat (NTB)

Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu variabel makro ekonomi dalam menilai bagus atau tidak kinerja perekonomian di suatu Negara maupun provinsi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Indonesia tentu akan ditopang oleh adanya pertumbuhan ekonomi di berbagai provinsi di wilayah Indonesia. Berikut perbandingan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi di NTB dapat dilihat dari Grafik di bawah ini.



Grafik 1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi

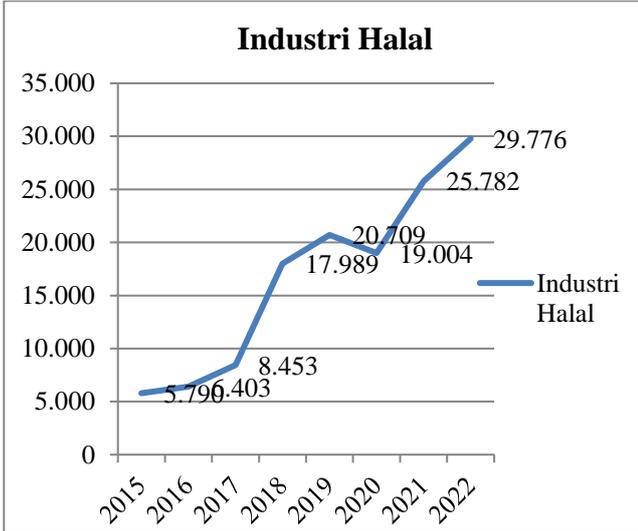
Sumber: Data diolah dari Badan Pusat Statistik

Berdasarkan grafik diatas pertumbuhan Ekonomi Di NTB cenderung mengalami fluktuasi yang cukup cepat dari tahun 2015 hingga 2022. Dapat dilihat

PDRB NTB berdasarkan harga konstan di tahun 2015-2017 mengalami kontraksi yang mendalam hingga minus 4,5%. Pertumbuhan ekonomi NTB sangat bergantung pada sector tambang. Penurunan yang signifikan ini disebabkan oleh berhentinya operasional sector tambang PT Newmont di Pulau Sumbawa. Rasionalisasi karyawan dan tenaga kerja, ditandai dengan beralihnya tenaga kerja mencari pekerjaan pada sector yang sama di daerah lain, pengurangan jam kerja sangat berdampak terhadap aktivitas ekonomi sector lainnya. Kondisi ini sangat berdampak pada sirkulasi barang maupun jasa serta distribusinya (Irwan, 2020). Ditengah keterpurukan PDRB NTB, dalam ajang pariwisata bergengsu tingkat dunia *World halal Travel Summit 2015* yang digelar di The Emirates Palace ballroom, Abu Dhabi, Uni emirat Arab (UEA). Indonesia melalui NTB mendapat penghargaan yang membanggakan yakni *World's Best Halal Beach Resort*, *World's Best Halal Honeymoon Destination*, dan *World's Best Halal Tourism Destination*. Hal ini menjadi perhatian penuh pemerintah setempat untuk mengembangkan perekonomian di NTB tanpa ketergantungan dari sector tambang. Adanya kondisi ini menarik perhatian Gubernur NTB dan jajarannya untuk mengembangkan potensi industri halal dan asset keuangan syariah di NTB yang akhirnya menarik minat wisatawan lokal, maupun mancanegara untuk berwisata di NTB. Pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan perekonomian dan mengembangkan tempat-tempat wisata di NTB. Kerja keras ini mengantarkan NTB menempati posisi teratas sebagai wisata halal terbaik di dunia menurut GMTI 2019. Kemudian keseriusan pemerintah daerah NTB ini juga tertuang dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 61 Tahun 2022 tentang Roadmap Nusa Tenggara Barat Halal Industrial Park tahun 2022-2025.

Berdasarkan pengujian data Industri halal mempunyai dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di NTB. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji kausalitas Granger yang menunjukkan tingkat probabilitas sebesar 0,0168 atau kurang dari 0,05. Industri halal mempunyai pengaruh yang signifikan karena memberikan kontribusi yang besar terhadap kegiatan ekonomi riil. Karena didukung ekosistem halal yang baik. Penggunaan produk Halal tidak hanya akan berdampak pada PDB Indonesia tetapi juga berkontribusi terhadap kemajuan

gaya hidup Halal global, sehingga berdampak positif pada ekonomi Islam global (Adamsah, 2022).



Grafik 2 Industri Halal NTB

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa industry halal mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2017-2019. Namun adanya pandemic covid 19 membuat asset industry halal ini sempat mengalami penurunan. Pemprov NTB dalam mempercepat perekonomian berbasis industri mengeluarkan beberapa peraturan daerah yang tertuang dalam Perda no 13 tahun 2021-2024. Tujuan Perda ini untuk memayungi setiap pelaku bisnis dalam mewujudkan pembangunan industri nasional, industri daerah yang maju, berdaya saing dan mandiri. Kemudian Pemprov juga mengeluarkan Perda no 3 tahun 2020 terkait pengembangan ekonomi kreatif berbasis IT, seni dan budaya. Lahirnya 2 perda ini belum sejalan dengann share sector iindustri terhadap PDRB NTB yang masih relative kecil dibawah 4 persen tahun 2020 (BPS, 2021). Hal ini disebabkan oleh masih relative lambannya proses UMKM naik kelas di Provinsi NTB. Dinas Koperasi UMKM provinsi NTB mencatat di tahun 2021 ada 103.284 UMKM terdapat 86.922 unit (84,16%) kategori UMKM mikro, 15.119 (14,5%) UMKM usaha kecil dan usaha menengah hanya 1243 (1,2%).

Dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi di NTB, Pemerintah NTB terus mengadakan event-event mancanegara yang mampu mendatangkan wisatawan mancanegara dan local untuk berkunjung ke NTB. Sebagaimana dalam hasil wawancara yang sudah dilakukan bahwa pemerintah terus menerus berinovasi dalam meningkatkan industry halal di NTB tidak hanya pada sector pariwisata, namun juga sector

makanan dan minuman halal, fashion muslim dan lain sebagainya. Dengan mayoritas penduduk NTB adalah muslim yakni 5,23 juta jiwa yakni 96% dari penduduk di NTB. Ini mempermudah pemerintah dalam menggaungkan NTB sebagai tempat wisata “Muslim Friendly”.

Peningkatan industry halal di NTB sejalan dengan progres peningkatan asset keuangan syariah di provinsi tersebut. Meskipun terus mengalami peningkatan yang signifikan, namun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aset keuangan syariah dalam jangka pendek tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi NTB, Hal ini sejalan dengan penelitian Sunaryo (2022). Penyebab tidak signifikannya aset keuangan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh rendahnya indeks pangsa pasar dan inklusi keuangan syariah di NTB sehingga belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga diperkuat dalam hasil wawancara kepada kepala kantor BEI di NTB. Pangsa pasar keuangan syariah per Juni 2022 tercatat sebesar 10,41%, jauh lebih rendah dibandingkan pangsa pasar keuangan konvensional, sedangkan indeks inklusi keuangan syariah NTB mengalami fluktuasi yakni dthau 2016 inklusi keuangan NTB hanya mencapai 5,10%, tahun 2019 naik signifikan menjadi 22,05% pasca peralihan Bank NTB dikonversi menjadi bank NTB Syariah dimana kehadiran ini mendonkrak literasi dan inklusi keuangan syariah di NTB (Pemerintah Provinsi NTB, 2020). Bahkan kenaikan indeks literasi keuangan syariah ini sempat membuat NTB berada di posisi ketiga secara Nasional yang sebelumnya berada di posisi ke 23. Selanjutnya pendirian Bursa Efek Indonesia di Provinsi NTB ditahun 2017 juga membantu masyarakat mengetahui produk-produk pasar modal syariah. Namun demikian, tahun 2022, indeks literasi keuangan syariah ini turun menjadi 13,51%. Berdasarkan riset ADB Institute, literasi keuangan merupakan faktor intrinsik. yang mempengaruhi dan memotivasi orang untuk mencari informasi dan bertindak berdasarkan apa yang mereka ketahui. Dapat disimpulkan bahwa secara tidak langsung peningkatan indeks literasi keuangan syariah akan meningkatkan indeks inklusi keuangan syariah seiring dengan semakin besarnya pengetahuan masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan. Faktor kedua, inovasi dan daya saing industri keuangan syariah masih kalah dibandingkan industri keuangan konvensional. Hal ini terlihat dari semakin

terbatasnya inovasi produk keuangan syariah, semakin mahalnya harga produk dan layanan serta jaringan kantor yang tidak seluas industri keuangan konvensional sehingga belum bisa menjangkau masyarakat terutama di daerah terpencil. Pendirian ATM di berbagai wilayah di provinsi NTB juga masih sedikit bahkan di tempat-tempat wisata bank NTB syariah belum memiliki banyak kantor cabang dan ATM.

3.2.2. Kunci sukses NTB dalam mengembangkan Industri Halal

Gambaran umum potensi sumberdaya yang dimiliki NTB untuk memenuhi aspek ketersediaan bahan baku (material) yang memadai untuk menunjang kawasan industry termasuk melimpah. Semua sektor menunjukkan data yang variatif tetapi secara keseluruhan artinya kesiapan sumberdaya daerah kita sangat mendukung. Sehingga dalam konsteks industry halal, pengelolaan sumber daya inilah yang terpenting agar syarat untuk masuk kategori halalnya terpenuhi. Sejauh ini belum ada pemetaan dan data yang mampu memotret bagaimana processing bahan baku yang dilakukan oleh masyarakat sebagai penyedia sumber daya. Proses menjadi penting dalam industry halal, karena akan terkait dengan kualitas yang akan diperoleh nantinya di tahapan hilir saat telah menjadi produk olahan yang dikonsumsi atau digunakan masyarakat. Dari sektor perikanan misalnya, bagaimana masyarakat menangkap ikan, mengangkut hasil ataupun didinginkan terlebih dahulu sebelum didistribusikan dan kemudian dijual harus memenuhi konsep konsep halal. Demikian pula di sektor peternakan, pariwisata dan lain sebagainya, konsep halal industry menjadi prioritas dalam semua tahapan proses yang dilakukan di dalamnya (Lampiran Pergub No 16 tahun 2022).

Dalam merancang destinasi halal di NTB tentu membutuhkan waktu, tenaga dan pikiran yang ekstra, dalam hal ini kami terlebih dahulu merancang tujuan dari adanya destinasi halal itu sendiri agar niat kita yang baik ini dapat diterima oleh masyarakat dan lembaga-lembaga lainnya yang terkait. Kami memiliki beberapa tujuan dari destinasi halal Nusa Tenggara Barat adalah: a. Menjadikan Nusa Tenggara Barat sebagai tujuan Destinasi hala, b. Menampilkan potensi destinasi Nusa Tenggara Barat kepada masyarakat yang terdiri atas makanan, kuliner, hotel, restoran, catering, biro perjalanan wisata (tour & travel) dan spa. c. Menampilkan produk halal khas Nusa Tenggara Barat dalam rangka mendukung

destinasi halal. d. Mendorong tumbuh kembangnya entitas bisnis destinasi halal di lingkungan pariwisata Nusa Tenggara Barat.

Setelah tujuan ini terancang maka kamu menyiapkan beberapa hal yang sangat penting yang sifatnya mengikat dan terstruktur yakni: a. Menyusun Perda Pariwisata Halal, b. Sertifikasi dan Standarisasi Halal bagi 100 Hotel dan Restaurant 2016.

c. Rp 1 Milyar dana stimulan untuk sertifikasi usaha ekonomi halal. d. Kerjasama Disbudpar Prov. NTB dengan Badan Sertifikasi Halal MUI.

Untuk menuju kawasan industry halal dalam konteks ketersediaan potensi sumberdaya yang dimiliki daerah, ada beberapa strategi yang dilakukan oleh Pemprov NTB yakni:

a. *Halal Asessment*

Pengawasan kehalalan suatu produk perlu ada legitimasi dari unsur unsur terkait misalnya MUI (majelis ulama Indonesia) dalam hal memastikan bahwa produk produk yang dihasilkan dalam suatu industry telah di assesment kehalalannya dari mulai proses, distribusi dan produknya. Tentunya cakupan produk ini sangatlah luas tidak terbatas pada produk fisik saja, seperti pangan, kesehatan dan kosmetik tetapi juga produk non fisik seperti pariwisata halal dan industry kreatif yang juga membawa konsep halal. Pemerintah perlu memfasilitasi konsep halal untuk produk non-fisik bersama unsur terkait agar secara utuh halal industry ini dapat diterapkan dalam kawasan halal industry. Sebagai outputnya dari assesment ini adanya legitimasi halal (pengakuan) baik dalam bentuk logo halal untuk produk, proses sertifikasi halal (*halal certified*) untuk proses produksi maupun teknisinya.

b. *Halal Education*

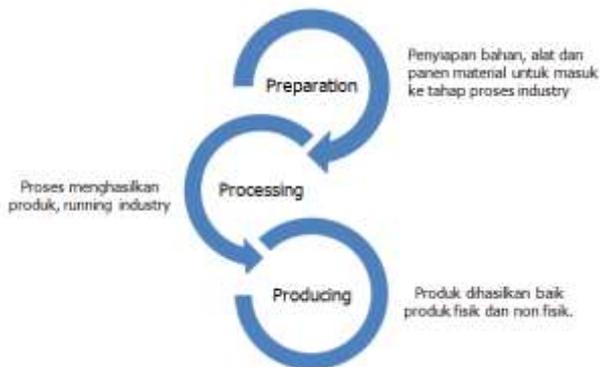
Untuk mendukung terlaksananya dan dapat diterapkannya kawasan halal industry, maka edukasi tentang konsep halal perlu dilakukan secara simultan. Edukasi akan menjadi brain investment untuk menyiapkan sumberdaya manusia yang dapat menjalankan kawasan industri halal. Selain itupula, edukasi akan memudahkan proses kolaborasi dengan masyarakat pemilik kawsaan di sekitar halal industry dan para pemasok bahan baku. Kegiatan kegiatan edukasi halal dapat dilakukan dengan menggandeng media sebagai corong manipulasi massa, perguruan tinggi melalui program

penelitian dan pengabdian masyarakat dan tentu pula pemerintah melalui kebijakan dan regulasinya.

c. *Halal With Research Development*

Strategi yang juga sangat penting untuk mendukung kawasan industri halal adalah riset dan pengembangannya. Berdasarkan data potensi sumber daya yang dimiliki NTB dari sektor maritime, pertanian, peternakan dan pariwisata maka potensi yang melimpah ini perlu untuk diberdayakan. Melalui riset maka dapat ditemukan kandidat pengganti bahan-bahan non halal yang berbasis potensi lokal. Dalam konteks kehalalan produk, riset akan menjadi penentu tingkat kehalalan produk secara cepat melalui teknologi pendeteksi bahan non halal dan riset juga dapat mengukur penerimaan konsep halal dalam proses industri dan persentase tingkat penerapan proses halal yang dilakukan di tengah masyarakat.

Untuk menjalankan dan penerapan kawasan industri halal, secara ringkasnya diilustrasikan sebagai berikut:



Gambar 2 Alur penerapan industri halal NTB

Berdasarkan alur tersebut maka halal assesement, halal education and rearch development perlu ada di tiap tahapannya. Selanjutnya, strategi tersebut diimplementasikan dalam mengembangkan potensi Industri halal yakni dengan mengembangkan beberapa hal yakni:

- a. Pengembangan Destinasi Pariwisata melalui: 1) Pengembangan Dan Penguatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Berbasis Kawasan Yang Di Dukong dengan Kualitas Pemenuhan Aspek 3 A (Amenitas, Aksesibilitas Dan Atraksi). 2) Pengembangan Kawasan Pariwisata Terintegrasi Melalui Penguatan Desa Wisata Dan Industri Pariwisata 3) Mendorong Pertumbuhan Investasi Bidang Pariwisata.

- b. Pengembangan SDM Pariwisata melalui: 1) Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas SDM Parwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Standarisasi dan Sertifikasi Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 3) Pembinaan dan Penguatan Koordinasi Kelembagaan Pengelola/Organisasi/Lembaga dan Masyarakat Kepariwisataaan.
- c. Pengembangan Pemasaran Pariwisata melalui: 1) Kondisi Ekonomi Global dan Nasional belum pulih 2) Promosi Pariwisata yang belum maksimal melalui BAS (Branding Advtising dan Selling) Potensi Pariwisata 3) Persaingan antar destinasi (DPSP) 4) Preferensi Wisatawan belum Maksimal untuk Meningkatkan kunjungan wisatawan berkualitas 5) Jumlah dan kualitas Event Pariwisata.
- d. Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui: 1) Belum maksimalnya pembinaan pelaku ekonomi kreatif selain subsektor Fashion, Kriya dan Kuliner. 2) Fasilitas Ruang Kreasi bagi Pelaku Ekonomi Kreatif 3) Penguatan Daya Saing Produk Pelaku Ekonomi Kreatif untuk akses pasar yang lebih luas.
- e. Pengembangan Islamic Centre melalui: 1) Islamic Center sebagai pusat Edukasi, Rekreasi, intraksi pariwisata dan Pusat Peradaban 2) Ketersediaan Sarana prasarana dan Penataan Sarana sebagai daya tarik termasuk Menara 99 Islamic Center 3) Media Komunikasi dan Publikasi termasuk teknologi informasi untuk akses informasi tentang IC 4) Islamic sebagai Pusat Peradaban 5) Paket Wisata Religi Terintegrasi dengan Islamic Center dan Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal

NTB tergolong provinsi yang tidak luas tetapi hampir seluruh pantai yang ada NTB baik itu di Lombok maupun di Mataram memiliki nuansa dan gelombang pantai yang bisa dinikmati oleh para wisatawan seperti Pantai Kuta, Pantai Selong Belanak maupun Pantai Aan sangat cocok bagi wisatawan yang ingin berselancar maupun terjun payung karena memiliki gelombang dan angin yang cukup kuat. Pantai-pantai ini pun sering mengadakan kegiatan perlombaan berselancar yang diikuti oleh turis lokal maupun mancanegara. Selain pantai-pantai Provinsi NTB juga memiliki tempat-tempat menarik yang lokasinya tidak berjauhan. Seperti Pantai Kuta yang berdekatan dengan Mandalika. Sebagaimana yang Bapak Ibu telah ketahui bahwa Mandalika merupakan

suatu tempat sirkuit atau balapan MotoGP skala internasional. Tentu ini menjadi magnet penarik bagi wisatawan mancanegara untuk berwisata ke Indonesia terkhusus di NTB. Mandalika memiliki jarak lintasan 4,32 km dan 19 sudut, Sirkuit Mandalika dengan konsep trek terbuka ini mampu menampung 150.000 penonton, terbagi antara 50.000 kursi tribun plus area lainnya. Dengan panorama langsung dibibir pantai Kuta. Pelaksanaan pembangunan oleh Mandalika Grand Prix Association (MGPA) selaku promotor dan operator sirkuit, Mandalika sebagai sirkuit internasional kebanggaan Indonesia kini menjadi primadona destinasi pariwisata Indonesia.

Tidak hanya menyajikan keindahan dari pantai dan mendalika, NTB juga memiliki kearifan lokal yang masih sangat kental dan terjaga adat istiadat dan budayanya. Dalam hal ini wisatawan lokal maupun internasional akan melihat langsung Desa Sade yaitu sebagai salah satu desa yang masih terjaga keasrian adat istiadatnya.

Potensi pariwisata di NTB juga didukung oleh lokasinya yang strategis yakni berada di dekat pulau Bali dan Pulau Komodo. Sehingga ketika turis sudah melakukan perjalanan pariwisata ke Indonesia biasanya akan menikmati wisata yang ada di provinsi Bali dan NTB sekaligus. Hal ini menjadi tempat yang strategis bagi kita untuk terus mengembangkan pariwisata Lombok. Sebagaimana tercatat bahwa sebanyak lebih dari 2500 wisatawan setiap harinya ke NTB melalui jalur udara. Hal ini dimanfaatkan oleh gubernur provinsi NTB untuk mengembangkan pariwisata halal sebagai brand dari destinasi pariwisata yang ada di NTB. Brand pariwisata halal ini telah sejalan dengan penerapannya di lapangan di mana hotel-hotel sudah banyak yang tersertifikat Syariah, restoran halal, fashion lokal yang bernuansa muslim seperti tenun sarung, peci khas mataram, jilbab tenun, dan sebagainya”

Kemudian di NTB pengembangan desa wisata memperkuat pengembangan pariwisata NTB. Hal ini membuat pertumbuhan PDRB Sektor kepariwisataan terus meningkat pasca pandemic covid 19. Namun demikian tidak semua lokasi pariwisata di NTB dapat dijadikan sebagai tempat pariwisata halal. Ada beberapa destinasi yang sangat kuat akan budaya atau pengaruh barat dimana lokasi ini didominasi oleh para wisatawan mancanegara yang memiliki budaya yang berbeda jauh dengan budaya Indonesia. Yakni Gili Trawangan, Gili meno dan Gili Air. Tiga gili ini merupakan pantai yang ada di wilayah NTB yang

memiliki gelombang air yang cukup tenang dan nuansa indah dapat dijadikan sebagai tempat bagi wisatawan untuk berjemur, bersepeda, berjalan-jalan, bersepeda, snorkeling dan berbelanja. Wilayah ini sangat kuat dengan unsur barat namun terpisah dari lokasi-lokasi lainnya. Untuk menuju lokasi ini, wisatawan harus menggunakan fast boat atau kapal penyerbangan. Namun demikian, Upaya pemerintah yang konkrit dan sistematis secara perlahan mulai dapat mengoptimalkan industri halal dan asset keuangan syariah di NTB. Pengembangan Industri Halal di NTB ini sejalan dengan keseriusan pemerintah daerah NTB yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 61 Tahun 2022 tentang Roadmap Nusa Tenggara Barat Halal Industrial Park tahun 2022-2025.

4. KESIMPULAN

Ditengah keterpurukan berhentinya operasional sector tambang yang menjadi tulang punggung mata pencarian terbesar masyarakat NTB. Pertumbuhan ekonomi di NTB dapat pulih kembali setelah pemerintah daerah Provinsi mencari alternative dalam pemulihan ekonomi masyarakatnya dengan melakukan pengembangan INDUSTRI HALAL di NTB. Setiap provinsi yang ada di Indonesia tentu memiliki daya tarik dan potensi yang berbeda beda namun sebagai Negara yang memiliki banyak pulau, pengembangan industri halal ini menjadi daya tarik tersendiri untuk menarik wisatawan berkunjung ke NTB. Keseriusan pemerintah dan peran aktif pemerintah menjadi tonggak yang kuat dalam mendorong industri halal ini. Sehingga industri halal ini mampu menarik minat wisatawan dan menaikkan pperekonomian masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi dapat meningkat dan bertahan di tengah kondisi ekonomi yang cukup sulit.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyelesaian penelitian ini tentu tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, terkhusus pada pihak yang bersedia diwawancarai yakni Kepala Dinas Pariwisata NTB beserta tim, kepala kantor BEI NTB. Serta pewawancara tambahan.

6. REFERENSI

Achdiat, Isnaeni, 2021. *Outlook Industri Jasa Keuangan Syariah Tahun 2022: Peluang dan Tantangan.*

- Adamsah, Bahtiar dan Ganjar Eka Subakti. 2022. Perkembangan Industri Halal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Indonesia Journal of Halal*. vol 5 no 1.
- Admin. 2022. Pergub No. 61 Tahun 2022 ttg Roadmap NTB Halal Industri Park Tahun 2022 – 2025, dalam website www.jdih.ntbprov.go.id
- Aprianti, Eka. 2022. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Profitabilitas Bank Rakyat Indonesia Syariah Di Indonesia*. Pascasarjana: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Bakar, Abu., dkk. 2021. Analisis Fiqih Industrial halal. *Jurnal Taushiah FAI UISU*. Vol. 11 No. 1
- Bidang IKP, 2020. *OJK NTB: Bank NTB Syariah Dongkrak Literasi Keuangan Nasional*. dalam website www.ntbprov.go.id
- Bkpm.go.id. 2022. *Cara Mendaftar Dan Mendapatkan NIB Di OSS*. [https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/cara-mendaftar-dan-mendapatkan-nib-di-oss#:~:text=NIB atau Nomor Induk berusaha dengan bidang usahanya masing-masing](https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/cara-mendaftar-dan-mendapatkan-nib-di-oss#:~:text=NIB%20atau%20Nomor%20Induk%20berusaha%20dengan%20bidang%20usahanya%20masing-masing)
- Charity, May Lim. 2017. Jaminan Produk halal di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol 14 No 1.
- Fathoni, Muhammad Anwar. 2020. Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. vol 6 no 3
- IDN Financial. 2022. *Ministry of Industry Launches IHYA 202.*, <https://www.idnfinancials.com>
- Irwan, Muhammad, dkk. 2020. Analisis Kualitas Pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Perspektif Maqasid Syariah. *Elastisitas- Jurnal Ekonomi Pembangunan*. vol 2, No 2
- J. Boukhatem and F. Ben Moussa. 2018. The effect of Islamic banks on GDP growth: Some evidence from selected MENA countries. *Borsa Istanbul Rev.*, vol. 18, no. 3, pp. 231–247
- Jailani, Novalini dan Hendri Hermawan Adinugraha. 2022. The Effect of Halal Lifestyle on Economics Growth in Indonesia. *Journal of Economics Research and Social Sciences*, vol 6 No 1
- Kasanah, Nur. 2022. Potensi, regulasi dan problematikan Sertifikasi halal Gratis, *Journal of Economics, Law and Humaities*. Vol 1 no 2.
- Kemenag.go.id. 2022. *DPR Dan Kementerian Dukung Sertifikasi Halal Gratis 10 Juta Produk Halal UMK*. <https://kemenag.go.id/read/dpr-dan-kementerian-dukung-sertifikasi-halal-gratis-10-juta-produk-halal-umk-kdmkz>.
- Kemenperin. 2023. *BBSPJIKFK Mendukung Penerapan Sertifikasi Halal*. pada <https://kemenperin.go.id>
- Kementerian Perekonomian. 2022. *Tak Hanya Miliki Domestik Market Yang Besar, Indonesia Juga Berpeluang Menjadi Produsen Halal Terkemuka Dunia*, www.ekon.go.id
- KNKS. 2019. *Indonesia's halal Industry: Thriving Domestic Halal Economy*. Insight Islamic Ekonomi Bulletin, 2019
- Madjid, Sitti saleha. 2022. Analisis Peluang, tantangan dan Strategi industry halal di Indonesia (Pada Masa Pandemic Covid 19). *Jurnal Pilar: Jurnal kajian Islam Kontemporer*. vol.3, No.1
- Muhammad, Kusnadi. 2023. Problematika Penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Di Indonesia,” *Jurnal Islamika*. vol 1, no. 2 (2019): 116–132. KNEKS, Berita dna Kegiatan, <https://kneks.go.id/beranda>
- OJK. 2022. Kesiapan Industri Jasa Keuangan syariah dalam mendukung Sustainable Finance, dalam Webinar pada 17 Maret 2022.
- Santoso, Ivan Rahmat, et all. 2019. The Role of Islamic Financial Institution in the Digital Era: Case Study in Indonesia, *ICIDS 2019: Preceeding of the First International Conference on Islamic Development Studies*.
- Silalahi, S.A.F., Fachrurazi, F. and Fahham, A.M. 2022. Factors affecting intention to adopt halal practices: case study of Indonesian small and medium enterprises. *Journal of Islamic Marketing*, Vol. 13 No. 6, pp. 1244-1263. <https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2020-0152>
- Sunaryo, Dimas Andhio dan Rahmatina Awaliah Kasri. 2022. Hubungan Industri Keuangan Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol 6, No 2
- Uswatun Khasanah. 2022. *Respon UMKM Dan Upaya BPJPH Dalam Pelaksanaan Sertifikasi Halal Melalui Halal Self Declare Di Kabupaten Bantul*. (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).
- Utomo, S.B., Sekaryuni, R., Widarjono, A., Tohirin, A. and Sudarsono, H. 2021. Promoting Islamic financial ecosystem to improve halal industry performance in Indonesia: a demand and supply analysis”, *Journal of Islamic Marketing*, Vol. 12 No. 5, pp. 992-1011. <https://doi.org/10.1108/JIMA-12-2019-0259>

7. LAMPIRAN



Gambar 3.
Dokumentasi wawancara di Dinas Pariwisata NTB



Gambar 4.
Dokumentasi wawancara di Kantor Perwakilan BEI NTB